

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (*e-Government*) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

Untuk mewujudkan visi Kota Kendari, maka dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah Kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

Untuk mengimplementasikan kerangka tersebut maka ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang akan didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dari masing – masing SKPD.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor : 52 Tahun 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Dinas

bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan rencana anggaran Dinas;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Dinas;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas sekretaris dan Kepala Bidang;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan perumusan pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manfaat lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pelaksanaan konservasi tanah dan air;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penghijauan dan reboisasi;
- j. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit pelaksana teknis, kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ;

1.3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari didukung oleh :

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari keadaan Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat / golongan dari tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) orang. Terdiri dari :

JUMLAH PNS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2018

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORG)
1	IV	9
2	III	52
3	II	57
4	I	5
	TOTAL	123

JUMLAH PNS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)
1	S2	9
2	S1/D4	49
3	Sarjana Muda (D3)	2
4	SMA	57
5	SMP	2
6	SD	3
	TOTAL	122

**JUMLAH PNS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MENURUT DIKLAT PENJENJANGAN
TAHUN 2018**

NO	DIKLAT	JUMLAH (ORG)
1	SPAMA/DIKLATPIM III	3
2	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	8
	TOTAL	11

**DAFTAR TENAGA NON-PNS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI TAHUN 2018**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH TENAGA
1	PEMBABAT RUMPUT	31
2	PENYAPU JALAN	130
3	PETUGAS DRAINASE	46
4	SOPIR MOBIL SAMPAH	54
5	BURUH SAMPAH	188
6	PETUGAS MEKANIK	6
9	SOPIR PENYIRAM TAMAN	2
10	OPERATOR DOZER/ALBER	2
12	PETUGAS TAMAN	96
13	SOPIR MOTOR SAMPAH	9
14	PEMBANTU PENGAWAS TPA	5
15	TENAGA PEMBERSIH KALI	16
16	ANGGOTA MOTOR SAMPAH	3
17	SATGAS	10
	JUMLAH	598

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari sebagai berikut :

SARANA DAN PRASARANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KOTA KENDARI

1. Barang Bergerak

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kota Kendari pada tahun 2018, meliputi fasilitas penunjang operasional guna terlaksananya tugas dan fungsinya terbagi 2 yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Tabel 1. Jumlah barang bergerak DLHK Kota Kendari menurut jenisnya

No	Barang Bergerak	Jumlah
1	Dump Truck	27 unit
2	Truk Arm Roll	10 unit
3	Truk Tangki	2 unit
4	Motor 3 roda	8 unit
5	Motor 2 roda	32 unit
6	Buldozer	2 unit
7	Excavator	1 unit
8	Backhoe Loader	1 unit
9	Convector	1 unit
10	Kijang Pick Up	3 unit
11	Toyota jenis wagon	3 unit
12	Mesin Pembabat Rumput	38 unit
13	Becak sampah	50 unit



Gambar 1. Sarana dan Prasarana Barang Bergerak DLHK Kota kendari

2. Barang Tidak Bergerak :

Barang tidak bergerak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari pada tahun 2018 tersebar di Kota Kendari

- ❖ Work Shop : 1 lokasi (3 Ha)
- ❖ Tanah TPAS Puwatu : 1 Lokasi / dengan 18 Ha

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Tidak Bergerak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

No	Nama	Alamat
1	Tanah lapangan Penimbun Pembuangan sampah/TPA	Jl. Khairil Anwar
2	Tanah Bangunan tempat kerja lainnya/Bengkel Pembibitan dan Base Camp	Jl. R.S. Jiwa
3	Gedung peralatan Garasi Dozer TPAS Puuwatu	Jl. Balaikota III Kelurahan Punggolaka,
4	Pintu Gerbang TPA Puuwatu Garasi Mobil	Kecamatan Puuwatu Jl. Khairil Anwar
5	Garasi Motor	Jl. Khairil Anwar
6	Pagar Pembibitan	Jl. Balaikota III
7	Barak Tempat Tinggal	Jl. Balaikota III
8	Gudang Peralatan	Jl. R.S. Jiwa
9	Gedung Kantor	Jl. R.S. Jiwa

10	Bengkel	Jl. Balaikota III
11	Instalasi Gas Methan	TPA Puuwatu
12	Instalasi Lechate	Jl. Balaikota III No. 60
13	Jembatan Timbang	Jl. Khairil Anwar
14	Gedung Laboratorium	Jl. Puwatu
15	Gedung Kebun Raya	Jl. Nanga- Nanga
16	Gedung Bank Sampah Induk	Jl. Tobuuha
17	Incenerator Sampah	RSUD kota Kendari



Gambar 2. Sarana dan Prasarana Tidak Bergerak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota kendari.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERNYATAAN VISI.

Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap

memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (*e-Government*) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

2.2 MISI

Berdasarkan visi tersebut maka Misi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari adalah: “Menata wajah Kota Kendari “. Yang mana apabila diuraikan, maka Misi yang di emban untuk mewujudkan Visi Kota Kendari terkandung sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota
2. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
3. Memperindah Kota Kendari yang dimulai dari setiap kelurahan

2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.3.1. Tujuan , Sasaran

Misi Menata Wajah Kota dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota, serta melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
 - c. Meningkatkan kualitas udara dan air

2.3.2. Indikator Kinerja

- a. Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara
- b. Persentase selisih timbulan sampah ke TPA
- c. Indeks Kualitas Udara Ambien
- d. Indeks Kualitas Air Permukaan

2.3.3. Program

Dukungan nyata dalam pencapaian misi, tujuan, sasaran yang sudah ditetapkan, harus ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nyata di lapangan. Untuk itu berdasarkan kebijakan yang ada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari telah menetapkan 8 program kerja sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah
- f. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- g. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- h. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- i. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- j. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- k. Pengendalian Banjir

2.3.4. Rencana Kerja

Adapun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek kebawah dan kesamping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPANRB No. 53 tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Kendari dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dapat dilihat sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2018 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2018.

3.1. PENGUKURAN KINERJA.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat capaian, yang menunjukkan besar sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2018 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian.

Pengukuran kinerja untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sudah dapat mewujudkan sasaran organisasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Kota Kendari selama tahun 2018 diperoleh hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2018 seperti tercantum dalam tabel lampiran.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dapat diformulasikan dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan evaluasi atas kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran untuk mengetahui kemajuan pencapaian kinerja serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Untuk mengetahuinya maka digunakan skala ordinal sebagai pengukuran tingkat keberhasilan sebagai berikut :

- 85% : Sangat Baik (SB)
- 70% s/d 85% : Baik (B)
- 55% s/d 70% : Cukup (C)
- < 55% : Kurang (K)

Pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dapat dilihat pada tabel (terlampir).

Tabel 3.1.
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama
DLHK Kota Kendari Tahun 2019

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA TAHUN 2019	REALISASI	PENCAPAIAN	KET
3	MENATA WAJAH KOTA	-	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	40.02%	40.02%	100%	Baik
		-	Persentase selisih timbunan sampah ke TPA	78.91%	78.91%	100%	Baik
		-	Indeks Kualitas Udara Ambien	87.12%	87.12%	100%	Baik
		-	Indeks Kualitas Air Permukaan	79.56%	79.56%	100%	Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari yang mendukung misi Walikota Kendari nomor 3 yaitu Menata Wajah Kota. Dengan pencapaian kinerja indikator Baik,

3.1.1. Luasan RTH, Sesuai arahan RTRW Kota Kendari yang mempersyaratkan 30% luas wilayah menjadi RTH, saat ini sesuai data yang ada, Kota Kendari baru memiliki RTH sebanyak 13,78% yang terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat, masih terdapat selisih sebesar 16,22%. Hal tersebut terjadi karena beberapa tahun terakhir tidak terdapat anggaran pembangunan RTH pada DLHK dan Dinas terkait, kecuali anggaran pemeliharaan rutin untuk taman-taman yang telah ada.

Oleh karena itu DLHK Kota Kendari hanya dapat memelihara RTH yang telah terbangun agar kondisinya tetap terjaga seperti semula. Disamping itu senantiasa menetapkan target pertumbuhan taman/RTH, menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta penambahan luasan RTH agar arahan regulasi RTRW dapat tercapai untuk mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi dan teknologi.

- 3.1.2. **Pengelolaan Persampahan**, Pada Tahun 2019 sesuai dengan Dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mulai dari kegiatan penanganan sampah dengan pengurangan dari target indikator kinerja utama DLHK sebesar 76,88% baru mencapai 72,1%. Hal tersebut terjadi karena laju timbulan sampah yang terus meningkat dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 3,4% penambahan tidak dibarengi dengan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- 3.1.3. **Kualitas Udara**, Sesuai data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan parameter NO₂ dan SO₂ pada tahun 2019 IKU DLHK ditetapkan sebesar 86,16% dapat dilampaui pada angka 86,219%. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan upaya-upaya pengelolaan penghijauan di taman-taman kota, mulai dari pembangunan taman baru, pemeliharaan rutin RTH, pemantauan dan pengawasan yang simultan sehingga menghasilkan kualitas udara yang terus meningkat.
- 3.1.4. **Kualitas Air**, dari 11 titik pengambilan sampel air baku permukaan diperoleh data bahwa rata-rata hasil uji parameter air seperti BOD, COD, TSS, DO dan seterusnya, masih berada dibawah ambang batas normal, akan tetapi bila didasarkan pada indeks pencemar maka kualitas air masuk dalam kategori cemar

ringan dengan angka 3,57. Untuk itu dibutuhkan Program strategis dan langkah nyata seperti :

- Penanaman pohon disepanjang bantaran kiri-kanan sungai, dari hulu sampai hilir.
- Pemeliharaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- Tidak membuang sampah di kali, sungai, drainase.
- Melakukan pengolahan air limbah domestik baik itu dari rumah tangga maupun industri.
- Memperbanyak sumur resapan dan biopori di kawasan pemukiman dan RTH.

Berdasarkan IKA Kualitas Air dapat dipersentasekan bahwa masih sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,08%.

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala – kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah. Dari hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun Anggaran 2018, dapat disajikan sebagai berikut :

a. Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. **98.400.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 94.411.850,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.

- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Rp. **143.940.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 85.634.032,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. **91.500.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 91.498.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 4) Penyediaan alat tulis kantor Rp. **30.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 29.999.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. **23.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 22.979.250,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. **17.438.250,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 4.948.600,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **20 %**.
- 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. **7.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 6.992.400,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 8) Penyediaan makanan dan minuman Rp. **50.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 45.991.350,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.

- 9) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. **263.550.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 263.488.024,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 10) Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. **24.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 24.000.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 11) Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rp. **92.832.480,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 25.420.226S,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dump truk (DAK) Rp. **410.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 409.990.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 2) Pengadaan pakaian kerja lapangan 175.000.000, realisasi pada kegiatan ini 172.000.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. **20.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Rp.916.247.500,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 812.189.322,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 88,64 %.

- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rp. **32.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 30.200.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. **5.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 4.778.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Rp. **98.689.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 98.658.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

d. Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

- 1) Pameran Pembangunan Rp. **30.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 29.694.9s00,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- 1) Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp.**4.754.451.400,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 1.966.832.000,- atau Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Rp. **13.768.160.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 11.397.520.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 3) Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Rp. 113.450.000 realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 107.650.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %

- 4) Penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebesar Rp. 144.200.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 126.847.500,- Persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 88 %.

f. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

- 1) Jaring Penutup Bak Mobil Sampah Sebesar Rp. 14.400.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 14.400.000,- presentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 100%.
- 2) Pengadaan Becak Sampah 50 unit sebesar Rp. 430.550.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 122.700.000,- presentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 28,50%.
- 3) Pengadaan Kontainer 10 Unit sebesar Rp. 402.600.000 realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 390.390.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 97%.
- 4) Pengadaan mesin pemotong tumpuk dan mesin senso 1 unit Sebesar Rp. 66.831.000,- realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 39.300.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 58%.
- 5) Pengadaan Incinerator Sebesar Rp. 2.712.600.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 533.540.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 19,67%
- 6) Pembuatan Bak Sampah 65 unit sebesar Rp. 656.000.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 411.892.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 62,79%
- 7) Pembuatan Bank Sampah Induk (DAK 2019) sebesar Rp. 357.350.000 realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 349.568.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 97,82%.

- 8) Pembuatan IPAL Usaha Kecil (DAK 2019) sebesar Rp. 105.142.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 105.042.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

g. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

- 1) Adiwiyata (Sekolah Hijau) Rp. **42.100.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 42.093.000 ,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 2) Pengadaan peralatan Alat Laboratorium Uji Kualitas Air sebesar Rp. 32.000.000,- Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 31.210.500,- Persentase Pencapaian Kinerja kegiatan sebesar 100 %.

h. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- 1) Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Rp. **344.200.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 339.121.500 ,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 2) Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Raya Rp. **18.500.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 16.454.000 ,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 3) Pembuatan Papan informasi kebun raya Rp. 8.000.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000,-..persentase pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar 100 %
- 4) Pembuatan papan nama kantor kebun raya Rp. 9.000.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000,-
- 5) Pemeliharaan RTH sebesar Rp. 70.000.000,- realisasi kegiatan ini sebesar 69.976.500,- persentase pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%

- 6) Pembangunan pendopo Taman Kota sebesar Rp. 9.982.500,- realisasi pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar Rp. 9.982.500,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 100 %.
- i. *Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*
 - 1) Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Rp. **113.450.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 107.650.000 ,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- j. *Program Pengendalian Banjir*
 - 1) Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali/Saluran Rp. **285.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 284.990.000 ,- Dengan Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

3. 3. ASPEK KEUANGAN

A. Sumber dan Penggunaan Dana

Untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari memperoleh dana yang bersumber dari APBD Kota Kendari dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Prestasi Pekerjaan dengan Realisasi Keuangan Tahun 2019 (terlampir)

B. Penilaian Atas Efisiensi dan Efektifitas Dana

Penilaian atas efisiensi dan efektifitas dana diukur menurut program, dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung Rp. 9.213.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.445.089.630,- (91,66%).

2. Belanja langsung Rp. 22.106.197.630,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.649.096.454,- (75,3%).

Yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

k. Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 12) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. **98.400.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 94.411.850,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 13) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Rp. **143.940.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 85.634.032,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 14) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. **91.500.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 91.498.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 15) Penyediaan alat tulis kantor Rp. **30.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 29.999.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 16) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. **23.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 22.979.250,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **100 %**.
- 17) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. **17.438.250,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 4.948.600,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar **20 %**.

- 18) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. **7.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 6.992.400,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 19) Penyediaan makanan dan minuman Rp. **50.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 45.991.350,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 20) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. **263.550.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 263.488.024,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 21) Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. **24.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 24.000.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 22) Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rp. **92.832.480,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 25.420.226S,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 6) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dump truk (DAK) Rp. **410.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 409.990.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 7) Pengadaan pakaian kerja lapangan 175.000.000, realisasi pada kegiatan ini 172.000.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

- 8) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. **20.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Rp.916.247.500,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 812.189.322,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 88,64 %.
- 10) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rp. **32.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 30.200.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

m. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. **5.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 4.778.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 4) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Rp. **98.689.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 98.658.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

n. Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

- 2) Pameran Pembangunan Rp. **30.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 29.694.9s00,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

o. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- 5) Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp.**4.754.451.400,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 1.966.832.000,- atau Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 6) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Rp. **13.768.160.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 11.397.520.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 7) Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Rp. 113.450.000 realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 107.650.000,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %
- 8) Penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebesar Rp. 144.200.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 126.847.500,- Persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 88 %.

p. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

- 1) Jaring Penutup Bak Mobil Sampah Sebesar Rp. 14.400.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 14.400.000,- presentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 100%.
- 2) Pengadaan Becak Sampah 50 unit sebesar Rp. 430.550.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 122.700.000,- presentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 28,50%.
- 3) Pengadaan Kontainer 10 Unit sebesar Rp. 402.600.000 realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 390.390.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 97%.
- 4) Pengadaan mesin pemotong tumpuk dan mesin senso 1 unit Sebesar Rp. 66.831.000,- realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 39.300.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 58%.

- 5) Pengadaan Incinerator Sebesar Rp. 2.712.600.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 533.540.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 19,67%
- 6) Pembuatan Bak Sampah 65 unit sebesar Rp. 656.000.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 411.892.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 62,79%
- 7) Pembuatan Bank Sampah Induk (DAK 2019) sebesar Rp. 357.350.000 realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 349.568.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 97,82%.
- 8) Pembuatan IPAL Usaha Kecil (DAK 2019) sebesar Rp. 105.142.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 105.042.000,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

q. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

- 3) Adiwiyata (Sekolah Hijau) Rp. **42.100.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 42.093.000 ,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- 4) Pengadaan peralatan Alat Laboratorium Uji Kualitas Air sebesar Rp. 32.000.000,- Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 31.210.500,- Persentase Pencapaian Kinerja kegiatan sebesar 100 %.

r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- 1) Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Rp. **344.200.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 339.121.500 ,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

- 2) Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Raya Rp. **18.500.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 16.454.000 ,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
 - 3) Pembuatan Papan informasi kebun raya Rp. 8.000.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000,-..persentase pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar 100 %
 - 4) Pembuatan papan nama kantor kebun raya Rp. 9.000.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000,-
 - 5) Pemeliharaan RTH sebesar Rp. 70.000.000,- realisasi kegiatan ini sebesar 69.976.500,- persentase pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%
 - 6) Pembangunan pendopo Taman Kota sebesar Rp. 9.982.500,- realisasi pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar Rp. 9.982.500,- persentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 100 %.
- s. *Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*
- 1) Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Rp. **113.450.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 107.650.000 ,- Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.
- t. *Program Pengendalian Banjir*
- 1) Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali/Saluran Rp. **285.000.000,-** realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 284.990.000 ,- Dengan Persentase Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 100 %.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pemerintah yang berisikan laporan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Selain itu laporan akuntabilitas juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh rata-rata pencapaian sasaran strategis yaitu 100%, yang dapat diartikan bahwa rata-rata capaian kinerja BAIK. Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 yang ditetapkan telah mencapai target capaian kinerja. Dengan kata lain sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2018 sesuai dengan target yang mencapai 100%.

Kaitannya dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD DLHK Kota Kendari berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai target pencapaian IKU. Pada tahun 2018 seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) DLHK Kota Kendari diakomodir didalam Perjanjian Kinerja (PK), yang mana seluruh indikator telah mencapai target capaian kinerja.

4.2. Faktor yang Perlu Ditingkatkan dalam Pencapaian Kinerja

Target seluruh indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dicapai dengan baik. Namun, masih diperlukan beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan capaian kinerja. Yang mana perlu adanya peningkatan anggaran yang optimal sesuai dengan target-target kegiatan yang diharapkan, selain itu diperlukan peningkatan kemampuan SDM yang merupakan faktor penting serta adanya kesepahaman tujuan yang sama untuk terlaksananya sinergitas dari seluruh *stakeholder* pengelola lingkungan.

4.3. Strategi Pencapaian Kinerja

Penanganan permasalahan lingkungan di Kota Kendari harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu melalui pola koordinasi antar lembaga serta pola kemitraan yang dijalin dengan seluruh *stakeholder* pengelola lingkungan.

Untuk kedepannya mengupayakan lebih banyak lagi kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan kesadaran dan peran masyarakat luas, baik dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, maupun upaya-upaya pemulihan kualitas lingkungan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai *stakeholders* bersama-sama dengan institusi pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi DLHK Kota Kendari.